

ANALISIS KINERJA BAPPEDA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Andi Ismawaty¹⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIP Bina Generasi Polewali, Polewali Mandar.

ABSTRACT

This study aims to determine aspects of performance support and aspects of performance apparatus inhibitors so that in the future it will become a reference for the regional development planning agency Polewali mandar in assessing performance. This type of research is descriptive with the sampling technique using proportionate stratified random sampling. Data collection was carried out by means of questionnaires, documentation and interviews which were then interpreted descriptively. The results showed that the technical policy process in the field of development planning as an indicator of the performance of the Polewali Mandar Regency Bappeda in the implementation of regional autonomy can be categorized well. Scientific facts show that the technical policy process is influenced by factors that support such as coordination, community participation, and government commitment. Meanwhile, the factors that hamper the process of policy formulation are budget readiness / readiness, too many proposals, and limited supporting documents.

Keywords: *Performance, Bappeda, Regional Autonomy*

1. PENDAHULUAN

Diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan tegas bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan;
- c. Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyimak tujuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 di atas, maka pembangunan merupakan pencerminan kehendak pemerintah pusat dan daerah untuk terus menerus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan berupaya menciptakan kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, khususnya terpenuhinya rasa aman, ketenteraman, dan kemakmuran yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menyikapi hat tersebut, menempatkan pemerintah daerah kabupaten/kota berada pada posisi sentral untuk berperan aktif dalam perencanaan program pembangunan melalui sistem pembangunan yang bersifat bottom up dengan mengakomodir keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan keputusan mendagri nomor 9 tahun 2000 yang menyatakan bahwa kesinambungan pembangunan dari pelita ke pelita dan penyusunan rencana pembangunan tahunan membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terpadu, serasi, selaras, dan seimbang antara sektoral, regional, daerah dan desa serta berbagai bentuk aspirasi masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana pembangunan daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan program-program pembangunan melalui mekanisme perencanaan yang mengakomodir kepentingan masyarakat yaitu melalui pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai amanat yang tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, dimana dalam proses penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD

Olehnya karena itu, sangat penting mengungkap kinerja Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Kabupaten Polewali Mandar, agar mendapat input pemikiran dalam rangka mencapai efektifitas kinerja Bappeda Kabupaten Polewali pada masa yang akan datang karena berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya selaku perencana di daerah, Bappeda masih belum optimal yang dibuktikan dengan

¹ Korespondensi penulis: Andi Ismawaty, Telp 085394385012, andiismawaty02@gmail.com

seringnya perencanaan yang dibuat tidak melalui mekanisme perumusan perencanaan bahkan implementasinya sering menyimpang dari perencanaan semula. Selain itu, beberapa kelemahan Bappeda Kabupaten Polewali yang dirasakan seperti dalam hal koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal masih kurang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desril Tafria (2010) tentang efektivitas Bappeda dalam perencanaan pembangunan Kota Padang di era otonomi daerah, menemukan bahwa Bappeda Kota Padang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah menuju sasaran efektivitas koordinasi, belum mencapai sasaran secara tepat dan maksimal namun secara umum telah dapat melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada perencanaan partisipatif meskipun belum didukung oleh pendayagunaan kemampuan staf atau aparatur untuk berpola pikir perencanaan secara keseluruhan.

Selain itu Anton Sudjarwo (2012) dalam penelitiannya terkait mekanisme peningkatan pola kerja Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah pada Bappeda Kota Pasuruan, menemukan bahwa Bappeda harus dapat menjabarkan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara profesional sehingga pada akhirnya akan dapat menghasilkan tingkat *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas* (kinerja) sesuai dengan harapan. Berdasarkan maka diperoleh empat strategi yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja Bappeda Kota Pasuruan yaitu dengan memanfaatkan SDM yang baik untuk meningkatkan profesionalisme sebagai perencana, mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah, meningkatkan mutu dan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah, dan memperbaiki proses perencanaan serta pengawasan perencanaan pembangunan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif untuk membuat deskripsi, gambar-gambar secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2009). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan pertimbangan bahwa populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner/angket yaitu dengan mendesain sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan indikator penelitian, telaah dokumen yakni untuk mengetahui jumlah aparatur Bappeda, sarana dan prasarana, golongan kepangkatan/masa kerja, maupun Diklat aparatur. Wawancara digunakan dengan melakukan interview sejumlah pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah guna menghasilkan informasi yang lebih akurat.

Interpretasi data digunakan dalam bentuk presentase yang menggunakan rumus analisis deskriptif dan hasilnya digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan skala Likert. Rumus yang digunakan (Sugiyono, 2001) adalah $P = \frac{F}{N} \times 100\%$, dimana P = Presentase, F = Frekuensi, dan N = Jumlah responden. Pembuatan tabel distribusi frekuensi ditetapkan klasifikasi jawaban sebanyak lima kelas, yaitu sangat tinggi (skor 5), tinggi (skor 4), sedang (skor 3), rendah (skor 2), dan sangat rendah (skor 1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Bappeda, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta staf menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkup Badan dan antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten maupun instansi lain sesuai tugas masing-masing, serta setiap pimpinan unit dalam lingkup Bappeda bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan organisasi diolah dan di pergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, para Kepala bidang menyampaikan laporan kepada kepala badan dan sekretaris badan dalam rangka penyusunan laporan berkala Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan di bahas bersama DPRD.

Tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian kinerjanya di ukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program

pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pembangunan belanja daerah (RAPBD).

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. Setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa disingkat RKPD Kabupaten. Dari hasil Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan, dapat di analisa bahwa penetapan rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan hasil rangkuman dan penyempurnaan dari prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan, serta menetapkan anggaran untuk prioritas kegiatan tersebut berdasarkan rencana kerja tiap-tiap SKPD. Penetapan arah kebijakan pembangunan semuanya tertuang dalam hasil musrenbang tingkat Kabupaten yang berupa rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor pendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, koordinasi dalam semua praktek pelaksanaaperumusan kebijakan di Kabupaten Polewali Mandar menjadi kunci utama dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri.

Selain koordinasi, partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah karena dari masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan. partisipasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam hal pembangunan daerah sangatlah tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan absen kehadiran pada forum musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten.

Faktor pendukung lainnya adalah komitmen pemerintah. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, komitmen telah diangkat sejak rapat pra persiapan musrenbang dalam bentuk nota kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak. Selain adanya kesepahaman yang dibangun bersama pihak-pihak terkait, untuk menjamin komitmen juga diperlukan aturan-aturan yang mengikat serta pengawasan yang mendalam pada proses perencanaan tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah penyesuaian anggaran. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, hal yang paling memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang di prioritaskan.

Selain penyesuaian anggaran, usulan yang terlalu banyak juga menjadi penghambat Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi munculnya begitu banyak usulan-usulan kegiatan, Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan maka semakin banyak pula usulan yang diajukan dalam forum tersebut. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dokumen penunjang. Seperti pada sebagian besar forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan di Kabupaten Polewali Mandar, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada forum musrenbang desa/kelurahan bahkan sampai tingkat kabupaten, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan desa dan atau daerah, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan serta daerah pada tahun sebelumnya tidak menjadi acuan data dalam perencanaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dilakukan dalam forum musrenbang, mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan sampai tingkat kabupaten.

- 2) Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan dokumen penunjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anton Sudjarwo, "Mekanisme Peningkatan Pola Kerja Bappeda Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Jurnal Reformasi*, Vol. 2, No. 2, 72, Juli – Desember 2012.
- [2] Desril Tafria, "Efektivitas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang Di Era Otonomi Daerah," *Wacana*, Vol. 13, No. 1, 163, Januari 2010.
- [3] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- [4] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," Kementerian PPN/Bappenas, 27 November 2008, [Online]. Tersedia <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/> [Diakses: 26 September 2019].
- [5] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jogloabang*, 13 Agustus 2019, [Online]. Tersedia <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah> [Diakses: 26 September 2019].
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfa Beta, 2001.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi banyak terhadap selesainya penelitian ini, mulai dari saat saya meneliti hingga diakhir penyusunan. Terkhusus ucapan terima kasih buat kampus saya, STISIP Bina Generasi Polewali yang senantiasa memfasilitasi saya pada saat masih proses penelitian serta kepada suami saya, Bapak Hasanuddin yang selalu hadir menyemangati dan menjadi teman bertukar ide bagi saya, terutama pada saat penyusunan hasil penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.